

Penerapan Jurnalisme Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Adopsi Inovasi Urban Farming dan Pemanfaatan Lahan Tidur di Kota Palembang)

Sumaina Duku

sumainaduku_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang

Abstrak

Jurnalisme pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang menarik akhir-akhir ini apalagi adanya program urban farming yang dipercaya dapat memberdayakan masyarakat miskin perkotaan. Media mendukung program urban farming sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan melihat penerapan jurnalisme pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalisme pembangunan sudah diterapkan di kota Palembang dengan adanya pemberitaan program-program pemerintah daerah oleh berbagai media yang ada di Sumatera Selatan salah satunya adalah program Urban Farming yang merupakan program pemerintah daerah kota Palembang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Selanjutnya peran jurnalisme pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat di kota Palembang dapat dilihat dengan antusias masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong untuk melaksanakan urban farming yang merupakan program pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia menjadi program yang dapat membantu perekonomian masyarakat di mana media massa yang ada di kota Palembang aktif memberitakan program ini sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti program ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pola adopsi inovasi urban farming dan pemanfaatan lahan tidur di kota Palembang terbagi menjadi *inovator*, *early adopter*, dan *early majority*.

Kata kunci; *Jurnalisme Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Urban Farming*

Abstract

Development journalism and community empowerment have become interesting things lately especially the existence of an urban farming program which is believed to be able to empower the urban poor. The media supports the urban farming program as a community empowerment program. This study aims to look at the application of development journalism in community empowerment. The results of the study show that development journalism has been implemented in

Pembangunan mengisyaratkan suatu kegiatan penting dan terencana untuk menghasilkan kebaikan. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat baik pada segi ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) maupun level mikro (komunitas atau grup).

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Skema pembangunan berkelanjutan: pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "...keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Berlandaskan dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh UNESCO maka jurnalisme pembangunan dianggap penting untuk diterapkan di negara-negara dunia ketiga untuk menunjang pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat miskin terutama masyarakat miskin kota.

Setelah reformasi, Indonesia menikmati kebebasan pers yang cukup besar, bahkan dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan negara lain, secara khusus dikawasan Asia Tenggara. Namun, kebebasan pers yang dinikmati secara luas tersebut masih meghadapi berbagai tantangan yang tidak jarang datang dari media itu sendiri. UU Pers tahun 1999 yang dipandang sangat liberal telah memberikan kesempatan bagi banyak perusahaan media bermunculan.

Sudah tentu seharusnya pengusaha media bekerja untuk kepentingan ekonomi, karena jika tidak, itu bisa menyebabkan mereka dengan cepat

kehilangan independensinya. Namun demikian, pemaksimalan keuntungan seharusnya tidaklah menjadi satu-satunya tujuan dari perusahaan media. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi publik, masalah kesejahteraan para pegawai dan demikian pula masalah otonomi para jurnalis juga merupakan bagian dari gambaran media yang demokratis dan sehat.

Kemajuan teknologi juga meningkatkan mobilitas sosial, mempermudah orang untuk saling berhubungan. Pergaulan berlangsung berupa kontak-kontak pribadi diikuti oleh tukar menukar gagasan dan pengalaman. Hubungan manusia dari satu bangsa dengan bangsa lainnya semakin intensif dan dunia seolah-olah menjadi semakin sempit. Mc Luhan menyebut dunia sekarang sebagai a global village. Teknologi media cetak mengalami perkembangan yang pesat. Media cetak mengalami perubahan setelah penyempurnaan mesin cetak dengan ditemukannya mesin offset yang dapat mencetak lebih cepat dan relatif lebih murah dalam jumlah besar.

Kemajuan teknologi ini juga telah dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Melalui radio, televisi, film, dan surat kabar dapat dikatakan seluruh pelosok tanah air telah terjangkau oleh jaringan komunikasi yang menghubungkan pusat dan daerah. Pesan-pesan pembangunan dari pusat ke daerah dan sebaliknya dapat dengan mudah disiarkan oleh media tersebut diatas. Melihat perkembangan kemajuan teknologi komunikasi banyak pengamat mengatakan bahwa negara-negara maju sekarang ini memasuki zaman informasi yang disebabkan oleh revolusi komunikasi. Menurut M. Alwi Dahlan (1983), informasi akan merupakan sektor ekonomi informasi. Ciri utama munculnya masyarakat informasi adalah terjadinya perkembangan teknologi yang semakin canggih, terutama dalam bidang komunikasi dengan perangkat lunak (software). Semakin canggihnya peralatan komunikasi yang digunakan akan memungkinkan penyebaran informasi lebih efisien dan efektif.

Pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis yang selama ini sering kita anggap sebagai suatu kesalahan yang wajar. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa

akhir. "Development is not a static concept. It is continuously changing", artinya juga bisa dikatakan bahwa pembangunan itu sebagai "never ending goal". Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining* proses) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu "innerwill", dan proses emansipasi diri, dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan (Tjokroamidjoja dan Mustapadijaja dalam Nawawi, 2009).

B. Konsep Teoritik Jurnalisme Pembangunan, Pemberdayaan, Difusi Inovasi, dan Urban Farming

1. Jurnalisme Pembangunan

Jurnalisme pembangunan merupakan gaya jurnalistik negara berkembang atau negara Dunia Ketiga yang mengutamakan peran pers dalam rangka pembangunan nasional. Jurnalisme pembangunan sering dimanfaatkan atau digunakan oleh pemimpin negara berkembang untuk mencapai tujuan dan kepentingan politiknya. Jurnalisme pembangunan atau "journalism of development" adalah jurnalisme yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang pembangunan. Jurnalisme pembangunan meyakinkan masyarakat akan masa depan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk melaksanakan jurnalisme pembangunan hendaknya sebuah perusahaan media didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh. Jurnalis wajib memahami misi perusahaan media di mana jurnalis bekerja seperti turut mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, berita-berita yang disebarakan haruslah bersifat membangun dan memberikan pencerahan, serta mengedukasi masyarakat.

Sifat-sifat jurnalisme pembangunan antara lain :

1. Sistem Komunikasi menjadi bagian integral pemerintah nasional

2. Jurnalis mengambil bagian dari tugas membangun bangsa (*nation-building*)
3. Pemerintah mengendalikan pemberitaan sehingga ada sensor bahkan pembredelan

Awal kemunculan jurnalisme pembangunan adalah adanya penekanan ganda akan jurnalisme pembangunan dalam hal pembangunan ekonomi di Asia dan teknik penulisan yang jelas mengenai pembangunan ekonomi tersebut. Jurnalisme pembangunan merupakan peliputan pembangunan sebagai proses yang berlangsung dalam periode tertentu secara berkesinambungan dan jangka panjang. Jurnalisme pembangunan mendekati isu pembangunan pada tingkat makro dan mikro, dan dapat berbeda bentuknya pada level nasional dan internasional. Menurut Aggarwala, dalam Nasution: 1998 dalam meliput berita, jurnalis pembangunan dapat dan harus kritis mengkaji, mengevaluasi, dan memberitakan :

1. Relevansi suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional, dan yang terpenting dengan kebutuhan lokal
2. Perbedaan antara program menurut rencananya dengan yang diimplementasikan, dan
3. Perbedaan antara dampaknya terhadap masyarakat seperti yang diklaim oleh pejabat pemerintah dengan yang sebenarnya.

Jurnalisme pembangunan (*Development Journalism*) berbeda dengan jurnalisme yang bersifat membangun (*Developmental Journalism*). Jurnalisme yang bersifat membangun didefinisikan sebagai sebuah jurnalisme yang hanya menyebarkan pandangan-pandangan pemerintah saja, sehingga terkesan hanya sebagai terompet pemerintah. Tidaklah demikian dengan jurnalisme pembangunan. Jurnalisme pembangunan, menurut Aggarwala dalam bukunya Hikmat dan Purnama (2005:272), lebih diartikan sebagai bentuk reportase investigasi baru. Dimana pekerjaan pelaku pers dalam hal ini adalah wartawan dan reporter tentang berita pembangunan adalah secara kritis memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan tentang; relevansi suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional dan kebutuhan setempat, perbedaan antara

perencanaan dan pelaksanaannya, serta perbedaan antara dampaknya terhadap rakyat seperti diklaim oleh para pejabat pemerintah dan seperti yang sebenarnya terjadi.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Menurut Suharto (2005:60), pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
2. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Fahrudin (2012:96-97), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. **Enabling**, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan

kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. **Empowering**, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. **Protecting**, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

3. Difusi Inovasi

Difusi Inovasi terdiri dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. Rogers 1995 dalam Sciffman dan Kanuk (2010) mendefinisikan difusi sebagai (the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system), proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial.

Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap/dirasa baru terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut.

Dari kedua padanan kata di atas, maka difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.

Pada masyarakat, khususnya di negara berkembang penyebarluasan inovasi terjadi terus menerus dari satu tempat ke tempat lain, dari bidang tertentu ke bidang lain. Difusi inovasi sebagai gejala kemasyarakatan yang berlangsung bersamaan dengan perubahan sosial yang terjadi, bahkan menyebabkan suatu hubungan sebab-akibat. Penyebarluasan inovasi menyebabkan masyarakat menjadi berubah, dan perubahan sosial pun merangsang orang untuk menemukan dan menyebarkan hal-hal yang baru.

Dalam proses penyebarluasan inovasi terdapat unsur-unsur utama yang terdiri dari inovasi, saluran komunikasi, durasi waktu, dan sistem sosial (Rogers dan Shoemaker, 2003). Inovasi adalah ide, tindakan, atau benda yang dipersepsikan baru oleh individu atau kelompok tertentu. Lima atribut dalam komunikasi adalah manfaat relatif, kompabilitas, kompleksitas, trialibilitas (kemampuan untuk dicoba), dan observalitas (kemampuan untuk diamati).

Faktor waktu dalam difusi inovasi terdiri dari tiga elemen, yaitu, proses keputusan-inovasi, *innovativeness*, dan kecepatan adopsi inovasi. Proses keputusan-inovasi adalah proses mental di mana individu melewati fase mendapat informasi pertama tentang sebuah inovasi, ke pembentukan *attitude* tentang inovasi tersebut, hingga menjadi keputusan untuk mengadopsi atau menolak, mengimplementasikan, dan mengkonfirmasi keputusan tersebut. Dalam proses keputusan-inovasi terdapat lima langkah, yaitu, pengetahuan (*knowledge*), persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. *Innovativeness* adalah tingkat seberapa awal suatu individu mengadopsi inovasi baru sedangkan kecepatan adopsi adalah ukuran seberapa cepat seseorang mengadopsi inovasi baru tersebut.

Rogers dan Schoemaker (2003) telah mengelompokkan masyarakat berdasarkan penerimaan terhadap inovasi yaitu :

1. Inovator, yaitu mereka yang pada dasarnya sudah menyenangi hal-hal yang baru dan sering melakukan percobaan.
2. Penerima dini (early adopter), yaitu orang-orang yang berpengaruh di sekelilingnya dan merupakan orang-orang yang lebih maju dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya.
3. Mayoritas dini (early majority), yaitu orang-orang yang menerima suatu inovasi selangkah lebih dahulu dari orang lain.
4. Mayoritas belakangan (late majority), yaitu orang-orang yang baru bersedia menerima suatu inovasi apabila menurut penilaiannya semua orang di sekelilingnya sudah menerimanya.
5. Laggards, yaitu lapisan yang paling akhir dalam menerima suatu inovasi.

4. Urban Farming

Konsep Dasar Pertanian Kota

Pertanian kota, dalam bahasa Inggris, memiliki beberapa pemahaman. Dalam bahasa Inggris, pertanian kota dapat disebut sebagai *Urban farming* maupun *Urban Agriculture*. Jika dalam bahasa Indonesia, pertanian kota berasal dari kata tani. Dalam KBBI, tani adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam, sedangkan pertanian adalah perihal bertani (mengusahakan tanam-menanam). Secara singkat, pertanian kota adalah kegiatan pertanian yang dilakukan di kota. Namun pertanian kota lebih dari sekedar kegiatan pertanian di kota.

Berdasarkan Bailkey et al. (2000) dalam *from brownfields to greenfields: Producing food in North American cities*, yang dimaksud dengan pertanian kota adalah penumbuhan (pembuatan), pemrosesan, dan distribusi makanan dan produk lainnya melalui budidaya tanaman intensif dan peternakan di sekitar kota. Dalam pengertian tersebut, disebutkan bahwa pertanian kota tidak hanya dalam dimensi kegiatan pertanian tanaman hortikultura saja, namun juga pada kegiatan peternakan.

Menurut CAST (*Council for Agricultural Science and Technology*), yang dimaksud dengan pertanian kota adalah sistem yang kompleks yang meliputi spektrum kepentingan, dari dari inti tradisional kegiatan yang berhubungan dengan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan konsumsi, untuk manfaat lainnya dan jasa yang kurang diakui secara luas dan terdokumentasikan. Hal ini termasuk rekreasi dan bersantai, kesehatan individu dan kesejahteraan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, keindahan pemandangan, serta perbaikan dan pemulihan lingkungan. (Fandy Puriandi, 2013: 229)

Selain urban farming istilah ini juga di kenal dengan urban agriculture. Di mana urban agriculture didefenisikan sebagai industri yang berlokasi di dalam kota (intra-urban) atau di pinggiran kota (peri-urban) dari suatu kota kecil atau kota besar yang menanam dan menumbuhkan, memproses dan mendistribusikan keragaman produk-produk pangan dan non-pangan, menggunakan sebagian besar sumber daya manusia dan alam (lahan, air, genetika, energi matahari dan udara), produk dan dan jasanya terdapat di sekitar wilayah kota dan bergantian menyediakan produknya bagi wilayah perkotaan itu (Luc Mougeot, 1999).

C. Pembahasan

Penelitian mengenai penerapan jurnalisme pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat (adopsi inovasi urban farming dan pemanfaatan lahan tidur di kota Palembang) diuraikan sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan jurnalisme pembangunan di kota Palembang dan mengetahui peran jurnalisme pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat kota Palembang, dan mengetahui pola adopsi inovasi urban farming di kota Palembang sebagai berikut :

Dalam penelitian ini jurnalisme pembangunan mendekati isu pembangunan pada tingkat mikro dan pada level regional dalam hal ini peneliti fokus pada satu program yaitu jurnalisme pembangunan dalam program urban farming. Dalam peliputan berita, jurnalis pembangunan yang ada di Sumatera Selatan memberitakan topik proyek pemanfaatan lahan tidur dan urban farming dalam hal ini proyek urban farming serta relevansinya dengan kebutuhan lokal.

Program urban farming ini merupakan program kerjasama antara Pemerintah kota Palembang dan Bank Indonesia. Pemberitaan mengenai Urban Farming serta pemanfaatan lahan tidur di kota Palembang rentang waktu 2015-2018 terdapat 12 pemberitaan dari berbagai media yang ada di Palembang sebagai berikut :

1. Pemberitaan Detak Palembang, Kamis 24 Maret 2016. ***Harnojoyo : Manfaatkan Lahan Tidur Untuk Swasembada Beras***

Dalam pemberitaan ini Walikota menghimbau kepada masyarakat yang memiliki lahan agar tidak dijual kalau bisa dimanfaatkan jangan jadi lahan tidur minimal untuk ruang terbuka hijau atau ditanami tumbuhan supaya bisa menjadi penghasilan bagi kehidupan masyarakat tersebut. Kota Palembang menurut Harnojoyo memiliki 6.180 hektar lahan tidur. Bantuan bibit, alat pertanian dan penyuluhan adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup bagi para petani.

Masih dalam pemberitaan yang sama, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan kehutanan kota Palembang Harry Hadi menjelaskan, saat ini kota Palembang telah mencapai indeks pertanaman (IP 200) yang luas tanamnya sebesar 230 Ha tersebar di empat kecamatan. Rinciannya antara lain Kecamatan Kalidoni seluas 115 Ha, Kecamatan Sematang Borang seluas 90 Ha, Kecamatan Kertapati seluas 10 Ha, dan Kecamatan Gandus seluas 15 Ha.

2. Pemberitaan Media Indonesia, 29 Maret 2016. ***Palembang Jaga Lahan Pertanian***

Dalam pemberitaan dijelaskan bahwa pembangunan yang terus meningkat tidak membuat kota Palembang Sumatera Selatan meninggalkan pertanian. Pemkot Palembang pun berkomitmen menjaga lahan persawahan dari kikisan alih fungsi lahan. “*Kami terus mendorong masyarakat tidak menjual lahan sawah mereka. Kami juga berupaya menjaga sawah dengan pemberdayaan, peningkatan produktivitas, dan perbaikan infrastruktur,*” ungkap walikota Palembang, Harnojoyo.

Sampai saat ini Palembang memiliki 6.180 Ha lahan persawahan berupa sawah lebak dan sawah pasang surut. Untuk mempertahankan luas persawahan tersebut pemerintah kota Palembang menggulirkan regulasi salah satunya memasukkan area persawahan dalam rencana tata ruang dan wilayah. Selain mempertahankan lahan persawahan yang ada, Pemkot Palembang juga berusaha memberdayakan lahan tidur untuk menjadi lahan pertanian. Jumlah lahan kosong memang kecil, tetapi apabila dikelola dengan baik bisa menyumbang pasokan pangan bagi Palembang.

3. Pemberitaan Sumatera Ekspres, 13 Oktober 2018. ***Lahan Pertanian Kota Tergerus.***

Pemberitaan ini menyoroti perkembangan yang pesat sebagai kota metropolitan membuat lahan pertanian di wilayah kota Palembang kian berkurang. Dari tahun lalu angkanya turun mencapai 10 persen. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Sayuti, mengatakan, saat ini luas lahan pertanian Palembang sekitar 5400 hektare. “Angka itu berkurang sekitar 10 persen dibanding tahun 2017 lalu yang mencapai 6 ribu hektare,” terangnya.

4. Pemberitaan RMol, 25 September 2017. ***Urban Farming Mampu Buat Palembang Tekan Inflasi Diatas Rata-rata Nasional***

Dalam pemberitaan dijelaskan bahwa inflasi yang diakibatkan cabai menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini. Pasalnya, dari cabai kenaikan harga dapat mempengaruhi bahan pangan, dan tentunya berdampak pada rupiah. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng didampingi Kepala Kantor Wilayah BI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Rudy Khairudin menyampaikan Urban Farming adalah upaya pihaknya dalam mengatasi lonjakan inflasi yang diakibatkan cabai.

Urban farming ini untuk pemberdayaan masyarakat, kami pilih cabai karena harganya fluktuatif di pasar. Upaya ini juga bisa mengendalikan inflasi di

Palembang. Tingkat inflasi Palembang yang rendah, bahkan diatas rata-rata nasional yakni 2,1% dari sebelumnya yang menyentuh angka diatas 5%.

Kegiatan Urban Farming yang aktif dilaksanakan BI bersama Pemerintah daerah setempat, merupakan kegiatan penting. Karena, melalui kegiatan ini dapat menjaga inflasi agar setara dengan negara-negara lain yang memiliki inflasi yang sangat rendah. Bagi BI kegiatan ini memiliki peran yang sangat besar. Karena ia mampu menjaga kestabilan Rupiah, yang menjadi tugas Bank Indonesia," ulasnya.

5. Pemberitaan **tribunsumsel.com** Senin, 14 September 2015 21:43. ***Minim Lahan, Palembang Jadi Project Urban Farming***

Dalam pemberitaan dijelaskan bahwa minimnya lahan bercocok tanam pertanian di Sumsel, khususnya Kota Palembang, membuat terobosan untuk mengembangkan Suta (Sentra usaha tani dan agribisnis) Nusantara. Sumsel merupakan provinsi ke-24 dibentuknya Suta Nusantara di Indonesia. Suta Nusantara sudah lebih 3 tahun berdiri, saat ini Suta Nusantara tengah mengembangkan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Tahun 2015 ini kota Palembang pihaknya akan mengembangkan file project Urban farming (pertanian dalam kota) memanfaatkan space yang ada.

Pada permulaan awal ini, terdapat 5 lokasi file project di Kota Palembang. Tiga diantaranya di Kalidoni, satu lokasi di Sako, dan satu lokasi lagi di IT II dan untuk Sumatera baru kota Palembang yang mengembangkan File Project Urban Farming ini tahun ini. Pihaknya Suta Nusantara akan membagikan secara gratis bibit pupuk dan pengendalian hama. Masyarakat tinggal merawat.

6. Pemberitaan Palembang.Go.Id 25 September 2017 19:35:48 ***Pemkot Palembang Bersama Bank Indonesia Ciptakan Kampung Cabai***

Dalam pemberitaan dijelaskan bahwa pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Bank Indonesia meresmikan Program Urban Farming Komoditas Cabai, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui tanaman cabai. Bertempat di Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II. Melalui program ini,

dibagikan tanaman bibit cabai dalam rangka meningkatkan perekonomian kepada kelompok masyarakat kelurahan di wilayah Kota Palembang untuk ditanam di halaman rumah masing-masing.

Deputi gubernur Bank Indonesia Sugeng mengungkapkan, program ini dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka menjaga inflasi ekonomi di bidang pertanian. "Bank Indonesia berharap melalui program ini kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi utamanya kebutuhan cabai, sehingga dapat menekan permintaan pasar terhadap cabai yang saat ini cukup tinggi, sehingga bisa menekan angka inflasi di Kota Palembang" Ungkap Sugeng.

7. Pemberitaan terasnews.id, Senin 25 September 2017. ***BI dan Walikota Resmikan Urban Farming Komunitas Cabe***

Dalam pemberitaan dijelaskan bahwa program Urban Farming Komoditas Cabai diresmikan Pemerintah Kota Palembang dan Bank Indonesia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui tanaman cabai, yang dilakukan di Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II, dihadiri Walikota Palembang H. Harnojoyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafizh Tohir, Senin (25/9/2017). Program yang dilakukan Bank Indonesia ini dengan bekerjasama Pemerintah Kota Palembang dalam rangka menjaga inflasi ekonomi di bidang pertanian untuk kota Palembang dan sekitarnya. Selanjutnya pihak pemerintah daerah akan mensosialisasikan program ini di seluruh kelurahan yang ada di kota Palembang

8. Pemberitaan **NuansaKita**, Rabu, 12 Oktober 2016 ***Pertanian Perkotaan (Urban Farming) Kampung Cabe Keramasan***

Dalam pemberitaan dijelaskan bahwa Urban Farming itu adalah pertanian perkotaan contohnya ialah kampung cabe di keramasan, contoh kongkret pertanian perkotaan. Program ini merupakan kerjasama Bank Indonesia dengan Dinas Pertanian dan Perikanan kota Palembang..

Program ini dilaksanakan dengan memberi lima polibag cabe setiap rumah tangga miskin ada 5000 bantuan BI, disebarkan kepada hampir 308 kepala keluarga miskin dalam Kelompok Wanita Tani. Ini bisa menjadi bantuan stimulan yang akhirnya bermuara kepada peningkatan pendapatan pada masyarakat, yang lebih lagi menjaga inflasi. Ini beda dengan bantuan lain, biasanya bantuan itu hanya berikan bantuan setelah memberikan bantuan ditinggal. Kita sebelum bantuan bibit itu kita berikan dulu pengetahuan, pelatihan, pengawalan, penjelasan dan sebagainya sampai mereka suka dan tertarik dan ada keinginan, baru mereka masuk kedalam program ini jadi terseleksi orangnya, jadi bukan asal dikasih.

Setelah mereka itu dikawal sampai memetik sendiri, memupuk sendiri, memelihara sampai tanaman cabe sampai panen, setelah panen tidak selesai sampai disitu mereka ada pembukuan mereka catat berapa panen, berapa jual, berapa beli, berapa yang ditabung, berapa yang mereka beli lagi. Tidak stop sampai disini nanti bergulir lagi menjadi program berikutnya. Untuk dikota Palembang baru ada dua kelurahan yang menjadi pilot project urban farming yaitu Kelurahan Keramasan dan Kelurahan Ogan Baru.

9. Pemberitaan Buletin Metropolis Rabu 10 Mei 17, **Fitrianti: Petani Palembang Bisa Belajar dari KTNA**

Dalam pemberitaan dijelaskan bahwa Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, menghadiri Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XV. Acara yang dibuka Presiden RI Joko Widodo, itu dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa, Desa Lhong Raya, Kecamatan Bandar Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu (6/5/2017). Sebanyak 38 ribu peserta dari seluruh provinsi, dari Aceh hingga Papua. Penas berlangsung mulai Sabtu (5 Mei) hingga Kamis (11 Mei).

Peserta dari Palembang sebanyak 44 orang, terdiri dari 36 peserta utama, 2 peserta swadana, dan 6 peserta peninjau. Wawako Fitrianti mengatakan, Penas KTNA ini adalah kegiatan yang bermanfaat untuk memotivasi petani di

Palembang. “Mereka bisa belajar bercocok tanam, mengelola hasil pertanian, termasuk belajar pemanfaatan teknologi untuk hasil pertanian,” ujar Fitrianti, Rabu (10/5/2017).

Ia juga mengatakan, Pemkot Palembang terus berupaya mengembangkan pertanian berbasis ekonomi kerakyatan.

Antara lain, bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Sumsel Babel, dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Palembang. Yakni dengan mengembangkan gerakan tanam cabai di pekarangan rumah warga, melalui Program Sosial Bank Indonesia Urban Farming Kampung Cabai.

Ada beberapa kelurahan yang dijadikan percontohan, yakni Kelurahan Keramasan dan Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, serta di Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Harrey Hadi, berharap melalui Penas KTNA di Aceh ini, petani Palembang bisa mempelajari teknik pertanian modern. Ia juga mengatakan, dari luas 6.200 hektare lahan sawah di Palembang saat ini, baru 500 hektare lahan yang bisa ditanam sebanyak dua kali.

10. Pemberitaan korankito.com Rabu, 12 Oktober 2016 *Dua Kelurahan Jadi Percontohan Kampung Cabai*

Dalam pemberitaan dijelaskan bahwa Kelurahan Keramasan dan Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati menjadi percontohan kampung cabai di Palembang pada Program Sosial Bank Indonesia Urban Farming Kampung Cabai. Ini merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia membagikan 5.000 bibit cabai kepada lebih kurang 300 Kepala keluarga (KK) yang terbagi kedalam empat Kelompok Wanita Tani (KWT) di dua Kelurahan di kecamatan Kertapati. Dengan adanya program Urban Farming ini

diharapkan kedepannya akan diteruskan dengan melakukan penyuluhan kepada KWT yang ada di setiap kelurahan.

Sementara itu Penyuluh Pertanian Keramasan Usman Apriadi mengatakan pengembangan budidaya penanaman cabai tidak sulit. Asalkan petani budidaya tersebut sabar dan mengerti cara membudidayakannya. Usman menjelaskan bibit cabai yang akan dibudidayakan tidak harus ditanam di tanah langsung melainkan bisa menggunakan media tanam sejenis polyback. Cabai yang ditanam dengan menggunakan polyback dapat menghasilkan 1 kilo sampai 1,4 kilogram cabai segar dan bisa dipanen 10 sampai 12 kali panen.

11. Pemberitaan sumsel.antaraneews.com pada Selasa, 26 September 2017 12:22 WIB ***BI meluncurkan program "urban farming" di Palembang***

Bank Indonesia meluncurkan program "urban farming" yakni mengajak kalangan rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan untuk mau menanam cabai dalam kaitan menjaga inflasi kebutuhan bahan pokok. Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menjelaskan bahwa cabai dapat menyebabkan kenaikan inflasi sehingga BI berusaha menjaga kestabilan rupiah dengan program urban farming. Sementara Kepala Perwakilan BI Sumsel Rudi Khairudin mengatakan pilot proyek urban farming ini telah dilakukan sejak tahun lalu yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan membangun kluster cabai dan kluster bawang merah. BI menggandeng Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan ibu-ibu PKK di Palembang untuk mengedukasi 255 orang ibu rumah tangga guna menggaungkan urban farming.

Dalam sambutannya dalam peluncuran program tersebut wali kota mengharapkan warga Kota Palembang bisa benar-benar menerapkan program urban farming tersebut dengan tidak membiarkan lahan menjadi terbengkalai. "Jangan lagi ada lahan tidur, harus dimanfaatkan, sayang. Indonesia ini sangat subur, bahkan menanam terkadang tidak usah disiram bisa subur sendiri, beda dengan negara-negara lain," kata Harnojoyo.

12. haluansumatera.com 12 Oktober 2016 - 18:45 WIB. ***Kampung Cabai di Keramasan dan Ogan Baru***

Dalam pemberitaan dijelaskan sebagai berikut:

Dua kelurahan yaitu Keramasan dan Ogan Baru yang terletak di Kecamatan Kertapati menjadi percontohan sebagai kampung cabai di Kota Palembang. Program sosial *urban farming* atau kampung cabai ini diselenggarakan kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah kota Palembang. Kepala Bank Indonesia Wilayah VII Palembang, Hamid Ponco Wibowo, menyampaikan, harga komoditas cabai yang tak tentu (fluktuatif, red) jadi salah satu penyumbang inflasi di Palembang. Sedangkan Palembang sendiri menjadi salah satu titik dasar penghitungan inflasi selain Lubuk Linggau.

Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, menyampaikan, *urban farming* kampung cabai sangat bermanfaat bagi warga. Selain bisa dikonsumsi sendiri, panen cabai juga bisa dijual. Apalagi, cabai adalah bahan baku pendamping pempek, makanan khas Palembang yang diekspor tak hanya ke luar Sumsel, tapi juga mancanegara. “Mudah-mudahan, dengan kegiatan ini bisa membantu ekonomi masyarakat setempat serta menambah KWT yang ada,” tegasnya.

Dari pemberitaan yang ada terlihat dengan jelas penerapan jurnalisme pembangunan yang dilakukan oleh media di mana media sangat mendukung program *urban farming* yang digagas oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah kota Palembang. Program nyata ini telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dengan terciptanya kampung cabai, aktifnya masyarakat kota memanfaatkan lahan kosong dan juga pekarangan rumah untuk menanam dan pola adopsi inovasi meliputi *early adopter*, *late majority*, dan *laggard*. Dengan adanya program *urban farming* masyarakat kota Palembang dapat diberdayakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu: Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. Perbaikan pendapatan terlihat

dari pola pertanian sebelumnya dengan sistem yang masih tradisional dengan menggunakan galangan setelah adanya program urban farming berubah sistem bertanam menjadi bertanam dalam polibag dan hasilnya jauh melampaui bertanam sistem tradisional.

Selanjutnya, Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Program urban farming dapat memperbaiki lingkungan dari hasil penelitian didapatkan bahwa lahan yang digunakan untuk bertanam sebelumnya adalah lahan kosong dan menjadi tempat pembuangan sampah setelah diubah menjadi tempat penanaman tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah dan lingkungannya menjadi asri.

Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat, dan Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Dalam jangka panjang apabila program ini berlanjut maka pemanfaatan lahan kosong yang ada di kota Palembang menjadi semakin produktif dan efektif.

Kunci pokok yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

Selanjutnya adalah partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang,

bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Simpulan

Untuk menyatakan penerapan jurnalisme pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat, dapat dibagi menjadi 3 sub bagian kesimpulan berikut :

1. Penerapan jurnalisme pembangunan di kota Palembang

Jurnalisme pembangunan sudah diterapkan di kota Palembang dengan adanya pemberitaan program-program pemerintah daerah oleh berbagai media yang ada di Sumatera Selatan salah satunya adalah program Urban Farming yang merupakan program pemerintah daerah kota Palembang bekerja sama dengan Bank Indonesia

2. Peran jurnalisme pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat kota Palembang

Peran jurnalisme pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat di kota Palembang dapat dilihat dengan antusias masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong untuk melaksanakan urban farming yang merupakan program pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia menjadi program yang dapat membantu perekonomian masyarakat di mana media massa yang ada di kota Palembang aktif memberitakan program ini sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti program ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Pola adopsi inovasi urban farming dan pemanfaatan lahan tidur di kota Palembang terbagi menjadi *innovator*, *early adopter*, dan *early majority*.

Early Adopters

Golongan yang termasuk *early adopters* biasanya mempunyai usahatani yang luas dan pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata petani yang tinggal di daerah sekitarnya. Golongan *early adopters* adalah golongan yang relatif berpandangan maju dan mempunyai wawasan yang luas

artinya mereka tidak selalu skeptis terhadap perubahan-perubahan baru yang berada di sekitarnya dan bahkan sebaliknya biasanya berpandangan positif terhadap adanya perubahan. *Early adopters* mempunyai hubungan yang luas dengan sumber-sumber asal informasi pertanian dan seringkali tidak menunggu penemuan penelitian yang dipublikasikan.

Late Majority

Golongan petani yang termasuk dalam klasifikasi ini biasanya berpendapatan lebih dari cukup bila dibandingkan dengan pendapatan rata-rata petani yang tinggal di sekitarnya. Partisipasi kelompok sebagian terbatas pada organisasi lokal di mana ciri organisasi seperti ini hanya cenderung menarik anggota-anggota dari lokalitas terdekat saja misalnya seperti organisasi kelompok tani.

Laggards

Golongan yang termasuk dalam klasifikasi *lagards* adalah mereka yang pada umumnya termasuk “tradisional” sehingga enggan untuk melakukan adopsi inovasi. Masyarakat yang mempunyai corak demikian merupakan mereka yang tergolong sudah lanjut usia, status sosialnya rendah, dan usahataniya sangat subsisten sehingga sangat sulit untuk mengubah dirinya dengan hal-hal baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1987). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Baumgartner, N, and H. Belevi (2007). *A Systematic Overview of Urban Agriculture in Developing Countries AWAG – Swiss Federal Institute for Environmental Science & Technology*. SANDEC – Dept. of Water & Sanitation in Developing Countries

- Berger, Charles R, dkk (1987) *Handbook of Communication Science*, The Publisher of. Professional Social Science.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarman. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- De Vito, Joseph A. (1997). *Human communication*. Terjemahan Agus Maulana/ Jakarta : Proffesional Books.
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln (2000). *Handbook of Qualitatif Research*. California; Sage Publications Ltd.
- Effendy, Onong Uchjana (1993). *Komunikasi dan Modernisasi*, Alumni : Bandung.
- Fahrudin, Adi. (2012) *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora. Bandung
- Hettne, Bjorn (1990). *Development Theory and The Three Worlds*. Longman Group Limited. London.
- Iqbal Pratama, Muhamad (2017) *Tingkat Partisipasi Wanita Tani Dalam Program Urban Farming Dan Hubungannya Dengan Kontribusi Pengeluaran Pangan Rumahtangga Di Kelurahan Keramasan kecamatan Kertapati Kota Palembang*. Skripsi Unsri 2017
- Littlejohn, Stephen W. (2002) *Theories of Human Communication*. Wadsworth-Thomson Learning, Seventh Edition.
- Maleong, J. Lexi, MA (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya, Bandung.
- Mc Quail, Denis. (1994). *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga.
- Merissan, M.A.dkk (2010). *Teori Komunikasi Massa*. : Ghalia indonesia. Jakarta

- Nasution, Zulkarimen. (2007). *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Rice, Ronald E. & Charles K Atkin (2001). *Public Communication Campaign*, 3rd edition SAGE Publications, Inc., California.
- Roger, Everret M. (1997). *A History of Communication Study*. Free Press.
- Rogers, Everett M. (1995). *Diffusion of Innovations*. 4thed. New York: Free Press.
- Simmons, Robert E. (1990). *Communication Campaign Management*. Longman.
- Soekartawi, (2005). *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Suharto, Edi, (2014) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama. Bandung
- Suparlan, Parsudi. (1994). *Pembangunan Yang Terpadu dan Berkesinambungan*. Balitbang Sosial. Depsos RI.
- Suwarsono. (2000). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES.
- UNESCO (2014). *Media Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Dan Budaya Damai*. Bali Indonesia
- Yin, Robert. K. (2006). *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Zubaedi, (2013) *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta